

**NEGOSIASI OTORITAS KEPEMIMPINAN PONDOK
PESANTREN PABELAN MASA KEPEMIMPINAN KYAI HAMAM
DJA'FAR 1965-1993**

Muhammad Ikhsan Ghofur

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Kotagede Yogyakarta

Alamat Email: Ikhsan.ghofur@yahoo.com

Abstract

Pesantren is an institution where its leadership is based on the descendants of the founders. However, with the development of the era, pondok pesantren has begun to experience system changes such as bureaucracy in it. This pesantren bureaucratization have an impact on the authority of kyai in which the leadership based on descendants turns into a certain qualification. The existence of pesantren bureaucratization does not eliminate the traditional authority. This is because in this bureaucracy there are some family members who have a certain position, so that between the traditional and legal authority are still applied in the modern pesantren. The combination of traditional authority and legal authority has become a demand for the survival of pesantren. The existence of traditional authority is due to the culture that exists in society, while legal authority has become a necessity of the development of the era.

Keywords: pesantren, heredity, bureaucracy and authority

Intisari

Pesantren merupakan lembaga di mana kepemimpinannya berdasarkan keturunan dari pendiri. Namun dengan adanya perkembangan zaman, pondok pesantren sudah mulai mengalami perubahan sistem di dalamnya dengan adanya birokrasi di pesantren. Birokratisasi pesantren ini tentunya berdampak pada otoritas kyai di mana kepemimpinan berdasarkan keturunan berubah menjadi kualifikasi tertentu. Adanya birokratisasi pesantren tidak menghilangkan otoritas tradisional yang ada. Hal ini dikarenakan di dalam birokrasi tersebut terdapat beberapa anggota keluarga yang menjabat posisi tertentu, sehingga

antara otoritas tradisional dan legal tetap berlaku di dalam pondok pesantren modern. Gabungan antara otoritas tradisional dan otoritas legal sudah menjadi tuntutan untuk keberlangsungan hidup pesantren. Adanya otoritas tradisional disebabkan budaya yang ada di masyarakat, sementara otoritas legal sudah menjadi kebutuhan dari perkembangan zaman.

Kata kunci: pesantren, keturunan, birokrasi dan otoritas

Pendahuluan

Agama dalam perkembangannya mengalami perubahan kedudukan di masyarakat. Hal ini terjadi dipengaruhi oleh arus globalisasi yang menjadikan manusia mengesampingkan agama. Turner menyatakan bahwa "*Global information technologies and their associated cultures undermine traditional forms of religious authority because they expand conventional modes of communication.*"¹ Manusia modern sekarang lebih menyukai hal-hal yang instan, hal tersebut juga termasuk pada agama. Manusia lebih menyukai googling, membaca terjemah untuk mengetahui suatu dalil agama daripada harus bertanya kepada pemuka agama. Pengaruhnya sangat besar sekali, di mana kedudukan agama menjadi lebih terpinggirkan. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang terjadi, di mana dahulu setiap orang memiliki urusan selalu meminta pendapat pemuka agama (kyai) dan sekarang masyarakat mengesampingkan itu. Proses perubahan tersebut juga berimbas kepada lembaga agama, salah satunya pesantren.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, kyai perlu melakukan perubahan di pesantren. Hal ini dikarenakan secara bertahap pesantren menempuh transformasi yang mendasar pada elemen-elemen pendidikannya. Transformasi tersebut terjadi dikarenakan penyesuaian terhadap modus pendidikan yang berlaku dan populer berkembang di luar pesantren. Pada dasarnya transformasi hanya menonjol pada struktur dan sistem pendidikannya, termasuk metode dan materi pengajaran yang digunakan. Namun, pada perubahan struktur pendidikan pesantren sangat tampak pada otonominya yang menipis dalam menentukan kebijakan pendidikan. Posisi pesantren terhadap subjek dalam menentukan setiap kebijaksanaan, lambat laun digusur oleh kondisi di mana pesantren telah menjadi salah satu

1 Bryan S. Turner, "Religious Authority and the New Media," *Theory, Culture, & Society* 24, no. 2, 2007, 5

objek pendidikan nasional.² Perubahan tersebut tentunya memberikan dampak yang besar bagi pesantren itu sendiri. Pesantren yang dulunya memiliki sifat otonom artinya tidak terikat oleh lembaga manapun, sekarang berubah menjadi pesantren yang harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta.

Berkurangnya otonomi pesantren juga berarti berkurangnya otoritas kyai di dalamnya. Pada waktu masih hidup, kyai berupaya melakukan pengkaderan yang diharapkan sebagai penerusnya. Kaderisasi dipusatkan kepada anak-anaknya. Jika kaderisasi gagal, jalan pintas yang ditempuh adalah mengambil menantu yang paling cerdas di antara istrinya atau menjodohkan putrinya dengan putra kyai lain.³ Namun, hal tersebut jarang ditemukan terutama pada pondok pesantren modern. Hal ini ditandai dengan adanya pesantren yang melakukan perubahan pada kepemimpinan menjadi kepemimpinan kolektif. Melalui kepemimpinan kolektif, sistem suksesi tidak didasarkan pada genealogi melainkan ditekankan pada profesionalisme. Jika terdapat kader yang memiliki kelengkapan yaitu keturunan kyai dan keprofesionalan, akan lebih meyakinkan yayasan untuk mengangkatnya menjadi penerus kepemimpinan pesantren karena ia memiliki persyaratan yang prestisius.⁴ Dari hal tersebut menandakan bahwa otoritas kyai di pesantren mengalami perubahan, karena menjadi kyai harus berdasarkan kualifikasi profesionalisme tidak berdasarkan kyai tersebut adalah keturunan dari kepemilikan pesantren.

Dipilihnya Pesantren Pabelan tidak lepas dari sejarah pondok pesantren tersebut. Dilihat dari sejarahnya, Pondok Pabelan berdiri pada abad 18 oleh Kyai Kerto Taruno, kemudian dilanjutkan oleh Kyai Muhammad Ali. Pondok Pabelan mengalami kevakuman selama dua kali dan pada tanggal 28 Agustus 1965, keturunan dari pendiri Pondok Pabelan abad 18 yaitu Kyai Hamam Dja'far mendirikan kembali Pondok Pabelan dengan kurikulum dan kepengurusan yang lebih modern.⁵ Kebijakan-kebijakan Kyai Hamam antara mengubah sistem pendidikan pesantren tradisional menjadi sistem pendidikan modern yang tidak hanya membekali santri dengan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum dan ketrampilan. Sistem pendidikan yang digunakan berbasis pada kurikulum KMI (*Kuliyatul Mu'alimien*

2 Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2012, 308

3 Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2005, 41

4 *Ibid.* 47

5 Sejarah Berdiri, <http://www.pesantrenpabelan.com/> diakses pada tanggal 22 Juni 2016

Islamiyah) seperti yang dipakai di almamater Kyai Hamam yaitu Pondok Moderen Darussalam Gontor, tetapi sedikit berbeda di mana Pondok Pabelan tetap menyatu dengan masyarakat.⁶ Tidak hanya itu, di dalam kepengurusan juga Kyai Hamam membentuk Badan Wakaf Pondok Pabelan untuk memperkuat Pondok Pabelan yang mana badan tersebut beranggotakan sesepuh dan Pamong Desa Pabelan.⁷ Kyai Hamam juga membangun kerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah (LSM).⁸

Tulisan ini mengkaji bagaimana otoritas Kyai Hamam Dja'far di Pondok Pesantren Pabelan serta bagaimana kombinasi antara otoritas tradisional dan legal dapat berlangsung di Pondok Pesantren Pabelan. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai perubahan otoritas yang dilakukan oleh Kyai Hamam di Pondok Pesantren Pabelan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.⁹ Data yang dikumpulkan pada penelitian lapangan ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini adalah pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Pabelan, masyarakat, dan dokumen yang menjelaskan kepemimpinan Kyai Hamam Dja'far.

Otoritas Weber

Penulis menggunakan teori otoritasnya Weber di mana Weber membagi otoritas menjadi tiga yaitu otoritas tradisional, otoritas kharisma, dan otoritas legal. Teori ini digunakan untuk menganalisis otoritas yang berlaku di Pondok Pesantren Pabelan.

1. Otoritas Tradisional

Otoritas tradisional merupakan otoritas yang didasarkan pada klaim pemimpin dan keyakinan para pengikutnya bahwa terdapat kelebihan dalam kesucian aturan dan kekuasaan yang telah berusia tua.¹⁰ Weber membagi otoritas tradisional menjadi empat macam,

6 Ajib Rosidi, *Kiai Hamam Dja'far dan Pondok Pabelan: Kesaksian S antri, Kerabat, dan Sahabat*, Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2015, 172

7 *Ibid.*, 104

8 *Ibid.*, 108

9 Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 8

10 Goerge Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, terj. Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2016, 143

yaitu: gerontokrasi dimana melibatkan kekuasaan yang dijalankan oleh orang yang lebih tua, patriarkalisme primer adalah kepemimpinan yang diperoleh karena pewarisan. Patrimonialisme yang merupakan dominasi tradisional dengan administrasi dan kekuatan militer yang merupakan instrumen penguasa yang murni bersifat personal. Feodalisme di mana membatasi kekuasaan pemimpin melalui hubungan yang lebih rutin bahkan kontraktual antara pemimpin dan bawahan.¹¹ Dari empat macam otoritas tradisional, penulis lebih kepada tipe patriarkalisme.

2. Otoritas Kharisma

Otoritas kharismatik terkait dengan kesetiaan terhadap mereka yang memiliki sifat luar biasa, kepahlawanan, atau seorang figur pahlawan yang memiliki kekuatan magnetik seperti yang dimiliki pemimpin revolusi, nabi, atau prajurit pejuang. Kemampuan lebih seseorang terhadap suatu hal perlu diakui oleh orang lain. Pengakuan tersebut berupa tindakan tunduk terhadap pemegang otoritas kharisma. Orang yang memiliki kharisma memiliki keunggulan tersendiri, dan keunggulan tersebut berdampak baik kepada pengikutnya. Pemegang kharisma melakukan tugas yang layak baginya dan menghendaki kesetiaan pengikut berdasarkan misinya. Kharisma akan hilang jika misi yang dilakukan tidak diakui oleh orang-orang.¹²

3. Otoritas Legal

Otoritas legal, terkait dengan kewibawaan yang diperoleh dari aturan yang dibuat dan diberikan kepada pemangku jabatan ketimbang orang yang memiliki sifat-sifat tertentu. Otoritas legal memiliki beragam struktural, namun yang paling menarik adalah birokrasi karena dipandang sebagai tipe paling murni dari dijalankannya otoritas legal. Tipe-tipe birokrasi adalah sebuah tipe organisasi. Unit dasarnya adalah badan yang diorganisasi secara hierarkis dengan aturan, fungsi, dokumen tertulis, dan cara-cara yang memaksa.¹³

Otoritas Kyai Hamam Dj'far di Pondok Pesantren Pabelan

Kyai Hamam Dj'far sebagai pimpinan Pondok Pesantren Pabelan memiliki dua otoritas yang mana dengan otoritas tersebut

¹¹ *Ibid*, 144

¹² Max Weber, *Sosiologi*, terj. Noorkholish, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, 295

¹³ Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, 140

mampu mendirikan kembali dan menjalankan Pondok Pesantren Pabelan. Weber menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, kharisma tidak dapat dirutinkan dan masih menjadi kharisma, dia berubah menjadi otoritas tradisional atau rasional-legal.¹⁴ Namun, untuk kepemimpinan Kyai Hamam Dja'far, antara otoritas tradisional dan otoritas legal menjadi satu kesatuan yang menjadikan kedudukan Kyai Hamam Dja'far dipatuhi di dalam Pondok Pesantren Pabelan. Otoritas tradisional Kyai Hamam Dja'far tidak hilang dengan adanya rasionalisasi di Pondok Pesantren Pabelan, justru otoritas tersebut menyatu antara otoritas tradisional dan otoritas legal, sedangkan otoritas kharismanya hilang dengan dihilangkannya panggilan gus dan den diganti dengan panggilan pak.¹⁵ Perubahan panggilan ini dilakukan supaya Kyai Hamam bisa lebih dekat dengan masyarakat tidak tersekat dengan status sosial yang dimilikinya.

Otoritas tradisional dilihat dari silsilah Kyai Hamam Dja'far yang merupakan keturunan dari pendiri Pondok Pesantren Pabelan. Silsilah Kyai Hamam yaitu Sunan Giri-Kyai Sobo (Juru Mertani)-Kyai Abdul Ghoni-Kyai Kerto Taruno-Kyai Muhammad Ali (Pendiri Pondok Pabelan tahun 1800). Kyai Muhammad Ali menurunkan Kyai Imam. Generasi Kyai Muhammad Ali II adalah Kyai Hasbullah yang menurunkan Kyai Dja'far (ayah Kyai Hamam).¹⁶ Dilihat dari silsilah yang dimiliki oleh Kyai Hamam Dja'far, otoritas yang dimiliki oleh Kyai Hamam Dja'far adalah tradisional yang mana lebih kepada patriarkalisme primer yaitu otoritas yang lebih kepada pewarisan.¹⁷ Kepemimpinan pondok pesantren berdasarkan keturunan juga tidak bisa dipungkiri oleh Kyai Ahmad Mustofa yang merupakan penerus dari Kyai Hamam Dja'far. Hal tersebut dikarenakan kepemimpinan pondok pesantren berdasarkan keturunan sudah membudaya di dalam masyarakat.¹⁸ Adanya garis keturunan kyai pada Kyai Hamam Dja'far menjadikan Kyai Hamam Dja'far diangkat menjadi Kyai Pondok Pesantren Pabelan.

Otoritas legal yang ada pada Kyai Hamam Dja'far ada pada kemampuan keilmuan yang dimilikinya, kemampuan itu menjadikan kualifikasi Kyai Hamam Dja'far diakui sebagai kyai pondok pesantren. Keilmuan Kyai Hamam Dja'far juga diakui oleh trimurti Pesantren

14 Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. 146

15 Wawancara dengan Kyai Ahmad Mustofa

16 Zainal Arifin Ahmad dalam Rosidi, *Kyai Hamam Dja'far dan Pondok Pabelan: Kesaksian Santri, Kerabat, dan Sahabat*. 99

17 Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. 144

18 Wawancara dengan Kyai Ahmad Mustofa

Gontor. Hal ini dapat dilihat dengan dipilihnya Kyai Hamam Dja'far sebagai anggota Badan Wakaf Pesantren Gontor.¹⁹ Tidak hanya itu mendapat ijazah langsung dari kyai yang tidak semua santri mendapatkannya juga bukti bahwa kemampuan Kyai Hamam Dja'far benar-benar diakui dan direstui oleh trimurti Gontor. Restu Kyai Gontor berlanjut pada Kyai Hamam Dja'far mendirikan Pondok Pesantren Pabelan.²⁰

Latar belakang keilmuan yang dimiliki Kyai Hamam Dja'far juga menjadikan adanya otoritas legal di dalam Pondok Pesantren Pabelan. Hal ini terlihat dengan tindakan Kyai Hamam Dja'far di Pondok Pesantren Pabelan. Pertama, pada nama pondok pesantren di mana Kyai Hamam Dja'far berani merubah nama Pondok Pesantren Pabelan menjadi Balai Pendidikan Pondok Pabelan, Magelang, Indonesia.²¹ Kedua, perubahan pada sistem Pondok Pesantren Pabelan itu sendiri, di mana pesantren pada umumnya bersifat tradisional pada waktu itu, namun Kyai Hamam Dja'far berani membangun pesantren dengan sistem yang lebih modern yaitu adanya Yayasan Badan Wakaf Pondok Pabelan,²² dan sistem pendidikan menggunakan sistem KMI.²³ Ketiga, melakukan kerjasama baik dengan maupun lembaga pelatihan²⁴ maupun pemerintahan.²⁵

Adanya otoritas legal di dalam Pondok Pesantren Pabelan tidak menghilangkan otoritas yang dimiliki oleh Kyai Hamam Dja'far, hanya saja di dalam otoritas tradisional pondok pesantren merupakan badan milik kyai, namun dengan adanya otoritas legal maka Pondok Pesantren Pabelan berubah kepemilikan menjadi milik yayasan. Perubahan kepemilikan tersebut tidak menghilangkan otoritas yang dimiliki oleh Kyai Hamam Dja'far di dalam Pondok Pesantren Pabelan. Hal ini dibuktikan dengan kedudukan Kyai Hamam Dja'far di Yayasan Badan Wakaf Pondok Pesantren sebagai penasehat dan pendiri Pondok Pesantren Pabelan dan posisinya tidak tergantikan selama Kyai Hamam Dja'far masih ada.²⁶ Menjabatnya Kyai Hamam

19 Wawancara dengan Kyai Ahmad Najib Amin, hal ini dinyatakan juga oleh Kafrawi Ridwan dalam Ajib Rosidi, *Kyai Hamam Dja'far dan Pondok Pabelan: Kesaksian Santri, Kerabat, dan Sahabat*. 261,

20 Ahmad Mustofa dalam buku *ibid*.154

21 Komarudin Hidayat dalam *ibid*. 17

22 Zainal Arifin dan Ida Uswatun Hasanah dalam Nunu Ahmad An-Nahidli Dkk, *Otoritas Pesantren dan Perubahan Sosial*. 168

23 Rosidi, *Kyai Hamam Dja'far dan Pondok Pabelan: Kesaksian Santri, Kerabat, dan Sahabat* . 173

24 Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin Ahmad

25 Radjasa Mu'tasim, *Profil 40 Tahun Pondok Pesantren Pabelan 1965-2005* (Muntilan: Pondok Pesantren Pabelan, 2005). 17

26 Data Arsip Pondok Pesantren Pabelan

Dja'far sebagai penasehat menandakan bahwa secara tradisional, otoritas Kyai Hamam Dja'far diakui, dan secara legal juga diakui bahkan otoritas legal itu mengukuhkan kedudukan Kyai Hamam Dja'far di Pondok Pesantren Pabelan.

Keilmuan Kyai Hamam Dja'far diakui tidak hanya di dalam Pondok Pesantren Pabelan, di luar pondok baik di lingkungan masyarakat hingga pemerintahan kemampuan Kyai Hamam Dja'far juga di akui. Hal ini dibuktikan dengan menjabatnya Kyai Hamam Dja'far di posisi penting baik di lingkungan desa hingga nasional. Posisi tersebut antara lain ketua Badan Musyawarah Desa Pabelan,²⁷ sekretaris MUI Magelang pada tahun 1969,²⁸ dan pada tahun 1980an Kyai Hamam berposisi Ketua MUI Jawa Tengah dan kepala Litbang GUPPO (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam) pusat.²⁹ Menjabatnya Kyai Hamam Dja'far di posisi penting menandakan bahwa secara legal, kualifikasi yang dimiliki oleh Kyai Hamam Dja'far diakui oleh masyarakat sehingga Kyai Hamam Dja'far memiliki otoritas legal di luar Pondok Pesantren Pabelan.

Kombinasi Otoritas Tradisional dan Otoritas Legal Pondok Pesantren Pabelan

Pada masa kepemimpinan Kyai Hamam Dja'far di Pondok Pesantren Pabelan, kepemimpinannya terdiri dari dua otoritas yaitu otoritas tradisional dan otoritas legal. Otoritas tradisioanal berlaku karena silsilah yang ada pada diri Kyai Hamam Dj'far, sementara otoritas legal dikarenakan kemampuan yang dimiliki oleh Kyai Hamam Dja'far. Tetapi, tidak hanya itu yang menyebabkan kedua otoritas tersebut tetap ada di Pondok Pesantren Pabelan, hal yang paling utama adalah sistem yang terbentuk di dalam Pondok Pesantren Pabelan.

Sistem yang dibentuk oleh Kyai Hamam Dja'far adalah sistem yang lebih modern yaitu birokrasi namun tetap melibatkan masyarakat sekitar.³⁰ Hal ini tentunya berdampak kepada kedua otoritas tersebut di mana untuk otoritas tradisional tetap terjaga karena hal tersebut sudah merupakan budaya yang ada di dalam masyarakat, dan otoritas legal yaitu adanya sistem modern dalam pesantren yang memiliki

²⁷ Rosidi, *Kiai Hamam Dja'far dan Pondok Pabelan: Kesaksian Santri, Kerabat, dan Sahabat*. 186

²⁸ *Ibid.* 185

²⁹ *Ibid.* 77

³⁰ Zainal Arifin dan Ida Uswatun Hasanani dalam Nunu Ahmad An-Nahidl Dkk, *Otoritas Pesantren dan Perubahan Sosial*. 168 hal ini juga diungkapkan di buku yang sama yaitu Ahmad Faiz Amin dalam Rosidi, *Kiai Hamam Dja'far dan Pondok Pabelan: Kesaksian Santri, Kerabat, dan Sahabat*. 173

hubungan erat dengan masyarakat. Menurut Weber otoritas tradisional didasarkan pada klaim pemimpin dan keyakinan para pengikutnya yang mana terdapat kelebihan dalam kesucian aturan dan kekuasaan yang telah berusia tua.³¹ Membudayanya pimpinan pesantren berdasarkan keturunan dikarenakan umur pondok pesantren yang sudah tua ditambah dengan masyarakat Jawa yang masih melihat nasab kyai (silsilah keturunan yang dimiliki oleh kyai).

Sistem yang dibentuk di dalam Pondok Pesantren Pabelan berupa sistem yang mana pekerjaan pesantren tidak seluruhnya dikerjakan oleh kyai, tetapi dikerjakan oleh divisi bidang kerja masing-masing.³² Hal ini sesuai dengan pernyataan Weber yang menyebutkan *A specified sphere of competence. This involves a sphere of obligations to perform functions which has been marked off as part of a systematic division of labour.*³³ Adanya pembagian kerja di Pondok Pesantren Pabelan menandakan bahwa sistem yang dibentuk oleh Kyai Hamam Dja'far berupa sistem otoritas legal.

Pondok Pesantren Pabelan pada masa kepemimpinan Kyai Hamam Dja'far terdiri dari badan-badan yang memiliki fungsi dan terikat oleh aturan-aturan. Sistem ini terlihat dari struktur organisasi yang berkembang berdasarkan kebutuhan yang ada. Sarana dan prasarana yang berkembang juga merupakan hasil dari berjalannya fungsi dari badan-badan yang terkait dalam birokrasi. Struktur kepengurusan juga terorganisir dalam satu hirarki kepemimpinan. Hal ini dikarenakan di dalam struktur organisasi Pondok Pesantren Pabelan semua bidang berfungsi membantu Kyai Hamam Dja'far untuk menjalankan kegiatan di dalam pesantren.

Di dalam birokrasi yang dibentuk oleh Kyai Hamam Dja'far terutama dalam struktur organisasi Pondok Pesantren Pabelan, pembagian kerja juga sudah cukup jelas berdasarkan divisi masing-masing dimana pendidikan dilaksanakan oleh KMI, pemeliharaan dan pengembangan perlengkapan pondok dijalankan oleh sekretariat Pemeliharaan dan Perluasan Badan Wakaf Pondok Pabelan, pengumpulan dan pembagian zakat dilaksanakan oleh Badan Zakat, dan pembinaan tradisi dilaksanakan oleh Pemelihara Tradisi Islam Pabelan.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Kyai Hamam Dja'far telah

31 Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. 143

32 Rosidi, *Kyai Hamam Dja'far dan Pondok Pabelan: Kesaksian Santri, Kerabat, dan Sahabat*. 394

33 Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*. 330

34 Rosidi, *Kyai Hamam Dja'far dan Pondok Pabelan: Kesaksian Santri, Kerabat, dan Sahabat*. 394-395

melakukan pembagian kerja yang jelas dan semua pekerjaan itu tidak dilakukan oleh seorang kyai pondok pesantren. Pembagian kerja berdasarkan divisi masing-masing menunjukkan bahwa Kyai Hamam Dja'far melakukan perubahan di dalam Pondok Pesantren Pabelan dimana otoritas kerja dilakukan per divisi dengan mengikuti tata aturan yang ada.

Adanya birokratisasi lembaga menjadikan kedudukan Kyai Hamam Dja'far di Pondok Pesantren Pabelan menjadi lebih jelas dalam aturan lembaga yang kemudian kedudukannya terbantuan dengan staf-staf yang memiliki kualifikasi tertentu. Birokratisasi lembaga mulai dilakukan mulai dari dibentuknya Persatuan Pemuda Pabelan di kalangan muda, sedangkan di kalangan tua dibentuk Pemelihara Tradisi Islam Pabelan. Kedua organisasi tersebut dibentuk untuk mendukung terbentuknya birokrasi yang baik di Pondok Pesantren Pabelan, sehingga terbentuklah Badan Wakaf Pondok Pabelan yang isinya terdiri dari sesepuh dan pamong desa.³⁵ Keterlibatan pamong desa dalam badan wakaf juga memiliki dampak bagi otoritas birokrasi yang ada. Hal ini dikarenakan pamong desa merupakan orang yang berpengaruh di dalam lingkungan desa, sehingga keberadaan Pondok Pesantren Pabelan dan badan wakafnya diakui di masyarakat. Memasukkan pamong desa berarti Kyai Hamam Dja'far melakukan kualifikasi terhadap orang-orang yang menjadi anggota Badan Wakaf Pondok Pabelan. Hal ini dikarenakan Kyai Hamam Dja'far memerlukan orang-orang yang memiliki pengaruh untuk perkembangan Pondok Pesantren Pabelan, sehingga Kyai Hamam Dja'far memasukkan pamong desa ke dalam badan wakaf dan pamong desa memiliki kualifikasi dalam pengaruhnya di dalam masyarakat.

Di dalam birokrasi yang ada di Pondok Pesantren Pabelan, Kyai Hamam Dja'far juga melakukan kualifikasi staf yang lain di mana staf tersebut berfungsi membantu Kyai Hamam Dja'far dalam membangun kembali pesantren. Kyai Hamam Dja'far memilih beberapa staf penting sesuai dengan kompetensi yang dimiliki stafnya. Pemilihan Muhammad Busyro dan Muhammad Balya sebagai staf merupakan langkah yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Pertama, sebagai pondok yang baru berdiri kembali tentunya membutuhkan seorang staf yang mengetahui seluk beluk daerah dan juga memiliki pemikiran yang luas. Kedua pemilihan staf juga harus sesuai visi misi yang akan dilakukan oleh pemimpin suatu lembaga. Kyai Hamam Dja'far melakukan hal itu, di mana Muhammad Balya merupakan

³⁵ Zainal Arifin dan Ida Uswatun Hasanah dalam Nunu Ahmad An-Nahidl Dkk, *Otoritas Pesantren dan Perubahan Sosial*. 168

pemuda Pabelan yang aktif dikegiatan pemuda³⁶ dan Muhammad Busyro merupakan alumni Gontor yang memiliki filosofi pendidikan Gontor,³⁷ sehingga tujuan Kyai Hamam Dja'far dalam membangkitkan kembali Pondok Pesantren Pabelan bisa berjalan lancar. Kemudian, dipilihnya Ahmad Mustofa sebagai Ketua Majelis Guru dikarenakan Ahmad Mustofa merupakan adik kandung Kyai Hamam Dja'far dan juga alumni perguruan tinggi membuat otoritas kyai dapat berjalan lancar.³⁸ Kyai Hamam Dja'far memposisikan Ahmad Mustofa sebagai Ketua Majelis Guru merupakan langkah strategis. Hal ini dikarenakan, sebagai Ketua Majelis Guru merupakan posisi untuk mengkoordinir guru-guru di Pondok Pesantren Pabelan. Kyai Hamam Dja'far memerlukan staf yang memahami maksud dan tujuannya dalam menjalankan dan mengembangkan Pondok Pesantren Pabelan. Hal ini dikarenakan sebagai adik tentunya lebih mudah mengatur dan mengkoordinir, dan sebagai alumni perguruan tinggi, tentunya bisa memahami sistem yang diinginkan oleh kyai Hamam Dja'far.

Diangkatnya adik Kyai Hamam Dja'far daripada Muhammad Busyro sebagai ketua KMI menandakan bahwa di dalam kepengurusan terdapat unsur keluarga yang menjabat salah satu kepengurusan. Hal ini yang menyebabkan otoritas tradisional di dalam birokrasi yang terbentuk di Pondok Pesantren Pabelan tetap terjaga karena di dalam birokrasi tersebut terdapat ikatan keluarga di dalamnya. Hal ini seperti yang digambarkan Weber yang menyatakan bahwa *From persons who are already related to the chief by traditional ties of personal loyalty. This will be called 'patrimonial' recruitment. Such persons may be kinsmen, slaves, dependents who are officers of the household, clients, coloni, or freedmen.*³⁹ Tidak hanya Ahmad Mustofa selaku adik dari Kyai Hamam Dja'far, tetapi Wasit Abu Ali juga diangkat di dalam kepengurusan sebagai sekretaris Pondok Pabelan sebelum Muhammad Balya.⁴⁰ Birokrasi yang terdiri dari anggota keluarga menandakan bahwa otoritas tradisional berlaku di dalam kepengurusan Pondok Pesantren Pabelan, karena dikuasai oleh keluarga.

Diangkatnya Ahmad Mustofa di dalam posisi yang strategis daripada Muhammad Busyro menandakan bahwa otoritas tradisional lebih diutamakan oleh Kyai Hamam Dja'far daripada otoritas legal. Hal

36 Rosidi, *Kiai Hamam Dja'far dan Pondok Pabelan: Kesaksian Santri, Kerabat, dan Sahabat*. 184

37 Muhammad Busyro dalam *Ibid.*, 177

38 *Ibid.* 67

39 Weber, *The Theory of Sosial and Economic Organization*. 342

40 Muhammad Balya dalam Rosidi, *Kiai Hamam Dja'far dan Pondok Pabelan: Kesaksian Santri, Kerabat, dan Sahabat*. 185

ini dikarenakan antara perekrutan staf otoritas tradisional dan otoritas legal lebih dipilih staf yang termasuk otoritas tradisional yaitu adik Kyai Hamam Dja'far. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa otoritas tradisional perekrutannya diambil loyalitas yaitu keluarga sedangkan otoritas legal yaitu perekrutan berdasarkan adanya kualifikasi yang dimiliki oleh staf. Dipilihnya Ahmad Mustofa menandakan bahwa otoritas tradisional tetap berlaku walaupun rasionalitas mulai ada di Pondok Pesantren Pabelan meskipun Ahmad Mustofa juga memiliki kualifikasi dalam kepengurusan.

Berdasarkan uraian di atas menandakan bahwa Pondok Pesantren Pabelan dalam kepemimpinan Kyai Hamam Dja'far terdapat kombinasi otoritas yaitu otoritas tradisional dan otoritas legal. Antara otoritas tradisional dan otoritas legal tidak saling melemahkan, walaupun di dalam pemilihan staf otoritas tradisional lebih di dahulukan daripada otoritas legal padahal staf yang diangkat secara kualifikasi otoritas legal jauh lebih baik daripada staf yang diangkat secara otoritas tradisional. Hal ini tentunya juga berkaitan dengan untuk mempertahankan otoritas tradisional pada kepemimpinan selanjutnya yang mana pemimpin Pondok Pesantren Pabelan yaitu K.H Drs. Ahmad Mustofa S.H, K.H. Ahmad Najib Amien Hamam, dan Kyai Muh Balya, sedangkan direktur KMI yaitu Radjasa Mu'tasim.⁴¹

Tidak hanya keluarga yang menyebabkan otoritas tradisional tetap ada di dalam Pondok Pesantren Pabelan, weber menyatakan bahwa *It may be recruited from other sources on an 'extra-patrimonial' basis. This category includes people in a relation of purely personal loyalty.*⁴² Loyalitas anggota tetap terjaga dengan adanya aturan yang mensyaratkan menjadi pengurus adalah santri yang pernah bermukim minimal lima tahun.⁴³ Sebagai santri yang sudah lama di Pondok Pesantren Pabelan tentunya sudah terbangun rasa loyalitas terhadap pemegang otoritas.

Pada otoritas legal, Kyai Hamam juga memberikan pelatihan keahlian kepada stafnya, salah satunya kepada Muhammad Balya. Hal ini dapat dilihat pada saat pertama Muhammad Balya mengajar di Pondok Pesantren Pabelan yaitu dengan mengajar mata pelajaran administrasi yang kemudian Muhammad Balya diposisikan menjadi sekretaris Pondok Pesantren Pabelan. kemudian dalam organisasi di luar Pondok Pesantren Pabelan, Muhammad Balya juga diposisikan

41 Mu'tasim, *Profil 40 Tahun Pondok Pesantren Pabelan 1965-2005*. 23

42 Weber, *The Theory of Sosial and Economic Organization*. 342

43 Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 11 Mei 1991 nomor 3

berdampingan dengan Kyai Hamam Dja'far baik menjadi sekretaris Badan Musyawarah Desa maupun menjadi wakil sekretaris mendampingi Kyai Hamam Dja'far sebagai sekretaris di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Magelang.⁴⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Kyai Hamam telah memberikan pembelajaran kesekretariatan kepada Muhammad Balya agar kemampuannya semakin baik dalam menjalankan tugas sekretaris Pondok Pesantren Pabelan. Menjadi sekretaris di berbagai organisasi tentunya memberikan pengalaman dan mengasah kemampuan Muhammad Balya dalam menjalankan tugasnya di bidang sekretaris.

Program kepelatihan tidak hanya diberikan kepada Muhammad Balya, program kepelatihan juga diberikan kepada staf yang lain dan juga masyarakat yaitu program diklat baik yang dilaksanakan dengan LSM maupun pemerintah.⁴⁵ Adanya program kepelatihan menandakan bahwa otoritas legal terus berjalan untuk perbaikan kualitas lembaga dan pengembangan kualifikasi staf, sehingga kinerja staf di dalam bidang yang dia jalani bisa lebih baik.

Di dalam pesantren juga Kyai Hamam Dja'far membentuk birokrasi bagi santri yang fungsinya membantu kyai dalam kegiatan santri. Hal ini tentunya memberikan pelajaran kepada santri untuk lebih mengenal sistem kerja birokrasi terutama birokrasi di dalam pesantren.⁴⁶ Dari pembelajaran tersebut menjadikan santri lebih siap untuk ikut dalam badan wakaf apabila sudah menjadi alumni, karena alumni menjadi syarat dalam menjadi anggota Badan Wakaf Pondok Pesantren Pabelan. Dari sistem yang diterapkan oleh Kyai Hamam Dja'far, Pondok Pesantren Pabelan menjadi lebih tertata secara birokrasi baik di dalam pengurus yayasan maupun di dalam lingkungan Pondok Pesantren Pabelan itu sendiri yang mana kegiatannya sudah di atur oleh Organisasi Pelajar Pondok Pabelan.

Adanya Organisasi Pelajar Pondok Pelajar menandakan secara tidak langsung Kyai Hamam Dja'far memberikan pelatihan kepada santri Pondok Pesantren Pabelan untuk hidup lebih tertata dalam organisasi. Hal ini dikarenakan di dalam kegiatannya terdapat sistem kerja yang telah dibentuk untuk menampung kegiatan seluruh santri. Tersistemnya kepengurusan santri menunjukkan bahwa Kyai Hamam Dja'far sudah melakukan suksesi untuk kepengurusan selanjutnya, sehingga apabila terjadi regenerasi kepengurusan maka generasi selanjutnya siap melanjutkan kegiatan Pondok Pesantren Pabelan.

44 Rosidi, *Kiai Hamam Dja'far dan Pondok Pabelan: Kesaksian Santri, Kerabat, dan Sahabat*. 184

45 Mu'tasim, *Profil 40 Tahun Pondok Pesantren Pabelan 1965-2005*. 14-17

46 *Ibid.*, 48-49

Namun, pada masa akhir kepemimpinan Kyai Hamam Dja'far, Pondok Pabelan mengalami kemerosotan. Kemerosotan ini dikarenakan ketidakhadiran Kyai Hamam Dja'far di Pondok Pesantren Pabelan.⁴⁷ Hal ini menandakan bahwa walaupun sistem sudah berjalan dengan baik tetapi kehadiran pemegang otoritas juga tetap dibutuhkan, karena kontrol dari pemegang otoritas diperlukan untuk keberlangsungan lembaga yang sudah berjalan. Pondok Pesantren Pabelan yang berjalan dengan otoritas tradisional dan otoritas legal tetap membutuhkan pemegang otoritas tertinggi.

Penutup

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di Pondok Pesantren Pabelan pada masa kepemimpinan Kyai Hamam tentang perubahan otoritas kyai dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, otoritas yang dimiliki oleh Kyai Hamam Dja'far adalah perpaduan antara otoritas tradisional dan otoritas legal. Otoritas kharisma hilang dengan dihilangkannya istilah gus di lingkungan masyarakat dan adanya sistem pesantren yang modern di pesantren. Otoritas tradisional di pesantren berlaku dikarenakan garis keturunan yang dimiliki oleh Kyai Hamam Dja'far yaitu keturunan dari pendiri pesantren pabelan pertama yaitu Kyai Muhammad Ali. Otoritas legal yang dimiliki oleh Kyai Hamam Dja'far adalah pada kualifikasi keilmuan yang dimilikinya dan sistem pesantren yang di rubah oleh Kyai Hamam Dka'far dengan sistem yang modern.

Kedua, proses negosiasi antara otoritas tradisional dan legal adalah pada sistem pesantren yang tetap menyatu dengan masyarakat. Masyarakat mengangkat Kyai Hamam D'a'far dikarenakan silsilah keluarga yang dimilikinya dan kemampuannya, kemudian di dalam sistem birokrasi yang telah terbentuk, Kyai Hamam Dja'far memasukkan anggota keluarga kedalam sistem sehingga yayasan tetap beranggotakan keluarga walaupun terdapat staf-staf lainnya. Peraturan pengurus yayasan juga menyebabkan kedua otoritas tetap terjaga yaitu dengan memberikan syarat tertentu sebagai pengurus yayasan.

47 Mu'tasim, *Profil 40 Tahun Pondok Pesantren Pabelan 1965-2005*. 19-21

Daftar Bacaan

- An-Nahidl, Nunu Ahmad, Dkk, 2010, *Otoritas Pesantren dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Anwar, Saifudin, 2010, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goodman, Goerge Ritzer & Douglas J, 2016, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, terj. Nurhadi Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mahfudh, Sahal, 2012, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS.
- Mu'tasim, Radjasa, 2005, *Profil 40 Tahun Pondok Pesantren Pabelan 1965-2005*, Muntilan: Pondok Pesantren Pabelan.
- Qomar, Mujamil, 2005, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*, Jakarta: Erlangga.
- Rosidi, Ajib, 2015, *Kiai Hamam Dja'far dan Pondok Pabelan: Kesaksian Santri, Kerabat, dan Sahabat*. Bandung: Dunia Pustaka Jaya.
- Turner, Bryan S, 2007, "Religious Authority and the New Media," *Theory, Culture, & Society* 24, no. 2.
- Weber, Max, 2009, *Sosiologi*, terj. Noorkholish, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dokumen Lain:

- Sejarah Berdiri, <http://www.pesantrenpabelan.com/> diakses pada tanggal 22 Juni 2016.
- Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 11 Mei 1991 nomor 3.

